

ABSTRAK

PUNGUTAN LIAR CALO DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DITINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Oleh :Ahmad Bukhori

Dosen Pembimbing Utama :Dr Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping :Sutrisni, S.H., M.H.

Proses pelayanan SIM yang berbelit belit, adanya pungutan liar, serta oknum-oknum yang memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan lebih dalam hal materi. Proses pembuatan SIM rawan terjadinya pungli. Pertama, karena persyaratan, karena banyaknya persyaratan yang menyulitkan banyak orang, sehingga menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM. Kedua, bagi mereka yang gagal dan gagal lagi dalam ujian itu, cari jalan pintas melalui calo dan bahkan juga dari internal anggota pelayanan SIM berikan satu peluang terjadi nya pungli.

Adapun Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana konsekuensi yuridis pungutan liar oleh calo menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satgas saber pungli dan Bagaimana status hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui calo. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau hukum positif dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Konsekuensi Yuridis Pungutan Liar oleh calo menurut Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli yaitu Pasal 4 huruf e memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Status hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui proses calo memang tidak ada perbedaan secara khususnya dengan Surat izin mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui prosedur yang benar atau sah. Secara hukum surat izin mengemudi (SIM) tersebut dinyatakan sebagai Surat izin mengemudi yang sah apabila mendapat legalitas dari kapolres.

Kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini. Masyarakat juga harus mendukung dengan adanya pemberantasan pungli yang dilakukan oknum kepolisian sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh adanya pungli tersebut serta perbuatan serupa tidak diulangi lagi oleh oknum polisi yang nakal serta harus dilakukan pengawasan terhadap pelaksana pembuatan SIM oleh Propam atau Propam.

Kata kunci: Pungutan liar,Calo, Surat izin mengemudi (SIM),Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli

ABSTRACT

ILLEGAL CHARGES IN THE PROCESSING OF A DRIVING LICENSE (SIM) REVIEWED ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 87 OF 2016 ABOUT THE TASK FORCE FOR SWEEPING ILLEGAL LEVIES

By: Ahmad Bukhori

Main Advisor: Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Supervising Lecturer: Sutrisni, S.H., M.H.

The SIM service process is convoluted, there are illegal levies, as well as elements who take advantage of it to get more benefits in terms of material. The process of making a SIM is prone to extortion. First, because of the requirements, because of the many requirements that make it difficult for many people, so use the fast way to get a SIM. Second, for those who fail and fail again in the exam, looking for shortcuts through brokers and even from internal SIM service members gives an opportunity for extortion to occur.

The formulation of the problem in writing this thesis is what are the legal consequences of illegal levies by brokers according to presidential regulation number 87 of 2016 concerning the saber extortion task force and what is the legal status of a driving license (SIM) issued through brokers. The purpose of writing this thesis is to get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory or positive law approach with several primary and secondary sources of legal material, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

The Juridical Consequences of Illegal Charges by brokers according to Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Extortion Clean Sweeping Task Force, namely Article 4 letter e provides recommendations to the heads of ministries/agencies and regional government heads to impose sanctions on extortionists in accordance with the provisions of the legislation, Status Legally, a driving license (SIM) issued through the process of brokers is no different in particular with a driving license (SIM) issued through the correct or legal procedure. Legally, a driving license (SIM) is declared as a valid driving license if it gets legality from the police chief.

The crime of illegal levies can be charged with corruption which is very closely related to the crime of this position. The community must also support the eradication of extortion by police officers so that the community is not harmed by such extortion and similar actions are not repeated by naughty police officers and supervision must be carried out on implementing SIM making by Propos or Propam.

Keywords: *Illegal Levies, Brokers, Driver's License (Sim), Presidential Regulation Number 87 Of 2016 Concerning Saber Extortion*